



1389/LD/X04

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

## PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

B1

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

## I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SAID PATOMBONGI  
 2. Jabatan : CALON WAKIL BUPATI - MAROS PERIODE 2016-2021  
 3. NHK : 36768  
 4. Tempat & Tanggal Lahir : SIDRAP, 28 Maret 1958  
 5. Alamat Kantor : Jl. \_\_, \_\_  
 6. Tanggal Pelaporan LHKPN : 16 Desember 2003, 30 Juli 2015

## II. DATA HARTA

## A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, di Kabupaten MAROS, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun 1998

## B. HARTA BERGERAK

## a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

1. Motor, merk SUZUKI, tahun pembuatan 2003, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003  
 2. Mobil, merk MITSUBISHI PAJERO SPORT, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 (Penambahan Data Baru)

## b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

## c. HARTA BERGERAK LAINNYA

## C. SURAT BERHARGA

## D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan)

## E. PIUTANG

## TOTAL HARTA (II)

## III. HUTANG

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )

## STATUS LAPORAN

	16 Desember 2003	30 Juli 2015
Rp.	2.500.000	Rp. 2.500.000
Rp.	2.500.000	Rp. 2.500.000
Rp.	11.000.000	Rp. 261.000.000
Rp.	11.000.000	Rp. 11.000.000
	----	Rp. 250.000.000
	----	----
	----	----
Rp.	3.773.921	Rp. 20.806.014
Rp.	3.773.921	Rp. 20.806.014
Rp.	----	----
Rp.	17.273.921	Rp. 284.306.014
	----	----
Rp.	17.273.921	Rp. 284.306.014
	----	----

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
PLH. DEPUTI

CAHYA H. HAREFA

Jakarta, 21 September 2015  
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN

DIREKTUR

CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.